

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi menjadi sebuah kata yang paling sering kita dengar saat ini. Lewat berita di televisi, surat kabar, bahkan melalui pembicaraan orang di sekitar kita. Korupsi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan “Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keperluan pribadi”. Sedangkan dalam undang-undang No. 20 tahun 2001 dapat diambil pengertian bahwa korupsi adalah “Tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti hancurnya perekonomian, rusaknya sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. (*Mansyur Semma : 2011 : 25*)

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi, terus berupaya secara konkrit, dimulai dari membenahan aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan - peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU anti korupsi, diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kemudian yang paling monumental dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 30 Tahun 2002, yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditambah lagi dengan dua Perpu, lima Inpres dan tiga Kepres. Di kalangan masyarakat telah berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Masyarakat Profesional Madani (MPM), dan badan-badan lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap, dan pikiran kita dari tindakan korupsi.

Kalau kita ungkap kasus-kasusnya, tentu tidak akan ada habisnya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa permasalahannya bukan bagaimana memberantas kasus demi kasus, tetapi bagaimana memperbaiki akhlak manusianya yang sudah bobrok berat. Fokus pemberantasan korupsi adalah bagaimana memperbaiki akhlak masyarakat Indonesia. Selama manusianya masih korup, maka pembentukan lembaga, penentuan prosedur, dan apapun juga selalu dapat diselewengkan dalam pelaksanaannya. Otak, akal, daya inovasi, dan daya kreasi manusia sangat dahsyat dan tak terbatas. Mereka senantiasa akan menemukan cara agar tindakan korupsinya sangat sulit dibuktikan. (*Kwik Kian Gie, Pikiran yang Terkorupsi : 2010 : 12*). Pemberantasan korupsi harus berfokus pada bagaimana memperbaiki akhlak, moral, dan tata nilai manusia Indonesia. Ini merupakan proses yang sangat panjang. Mungkin memerlukan waktu beberapa generasi. Hasilnya baru akan terasa dalam jangka waktu yang lama. (*Kwik Kian Gie, Pikiran yang Terkorupsi : 2010 : 15*)

Permasalahan korupsi yang akut, dan penyelesaiannya yang tak kunjung menemukan titik terang, menjadikan masalah tersendiri bagi masa depan bangsa Indonesia. Korupsi sepertinya tak kunjung habis dari bangsa ini, hal ini menjadikan sebuah pandangan baru terhadap penanganan korupsi. Di era globalisasi ini, praktek korupsi juga sudah semakin merajalela. Korupsi sekarang ini, tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat petinggi negara dan pegawai-pegawai perkantoran. Siapa pun sebenarnya bisa melakukan tindakan korupsi, tidak terkecuali para remaja. Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai diri mereka. Elliot Turiel (1978) menyatakan bahwa para remaja mulai membuat penilaian tersendiri dalam menghadapi masalah-masalah populer yang berkenaan dengan lingkungan mereka, misalnya: politik, kemanusiaan, perang, keadaan sosial, dan sebagainya. Tuntutan untuk menjadi manusia yang berpikir dewasa dimulai pada saat ini. Generasi remaja merupakan pondasi keberhasilan sebuah pembangunan. Jika generasi mudanya baik, maka akan terbawa terus hingga mereka menjadi penerus pemimpin bangsa. (*Mochtar Lubis : 2008 : 22*)

Untuk memberantas korupsi secara menyeluruh, diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah atau KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang telah banyak melakukan penanggulangan korupsi secara represif. Terbukti hingga saat ini tindakan represif masih belum memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Agar perilaku korupsi tidak semakin meluas, diperlukan tindakan pencegahan (preventif) terhadap potensi untuk melakukan tindakan korupsi di seluruh lapisan masyarakat, khususnya remaja. Mencegah korupsi sejak dini adalah hal yang wajib. Tetapi sayang, saat ini banyak pihak yang masih menyepelekan pendidikan korupsi yang ditanamkan sejak dini. Bahkan dari para remaja pun, masih banyak yang menganggap remeh soal korupsi, berlaku tidak peduli dan tidak mengetahui akan bahaya korupsi. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan remaja tentang korupsi serta kurangnya pendidikan anti korupsi untuk remaja. Padahal, dengan mereka terbimbing, teredukasi dengan bahaya korupsi mereka akan lebih berhati-hati terhadap korupsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kampanye antikorupsi untuk menanamkan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan suatu media komunikasi visual yang menarik untuk menanamkan semangat antikorupsi pada remaja. Kampanye antikorupsi dengan menggunakan media komunikasi visual dapat dijadikan salah satu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Memang tidak mudah untuk membuat Indonesia benar-benar bersih dari korupsi, tetapi selalu ada harapan selama mau berusaha.

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

- Sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- Korupsi sekarang ini, tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat petinggi negara dan pegawai-pegawai perkantoran, tidak terkecuali para remaja.
- Banyak remaja yang menganggap remeh dan tidak peduli akan bahaya korupsi.

- Kurangnya pengetahuan remaja sebagai pemimpin bangsa di masa depan tentang bahaya korupsi.
- Kurangnya pendidikan anti korupsi untuk remaja.

1.3 Rumusan Masalah

- Bagaimana memberikan informasi tentang contoh perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan remaja usia 12 – 15 tahun ?
- Bagaimana mengajak remaja usia 12-15 tahun untuk memerangi korupsi melalui media kampanye anti korupsi yang menarik?

1.4 Ruang Lingkup

Menanamkan semangat antikorupsi pada remaja Indonesia saat ini, serta mengajak para remaja sebagai generasi penerus bangsa yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang untuk melawan dan memerangi korupsi dengan melakukan perancangan media kampanye antikorupsi yang ditujukan kepada remaja usia 12 – 15 tahun di Indonesia.

1.5 Tujuan Perancangan

- Memberikan informasi tentang contoh perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan remaja usia 12 – 15 tahun.
- Mengajak remaja usia 12-15 tahun untuk memerangi korupsi melalui media kampanye anti korupsi yang menarik.

1.6 Manfaat Perancangan

1.6.1 Bagi Penulis

1. Meningkatkan wawasan penelitian mengenai korupsi yang menjadi masalah serius di Indonesia.

2. Menambah wawasan mengenai perancangan media kampanye yang sesuai bagi remaja awal usia 12-15 tahun.
3. Mengasah kemampuan untuk menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan yang dikaji.

1.6.2 Bagi Institusi

Hasil karya yang dirancang dapat menjadi dasar pengembangan pada disiplin ilmu Desain Komunikasi Visual untuk masa-masa ke depannya agar lebih baik lagi.

1.6.3 Bagi Masyarakat

1. Mengetahui dan menyadari pentingnya pemberantasan korupsi.
2. Meningkatkan kesadaran atas akibat dari perilaku koruptif.
3. Meningkatkan semangat anti korupsi dan menjadi masyarakat jujur anti korupsi.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif analitis. Metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan cara meneliti, menganalisis, menginterpretasikan, ditutup dengan kesimpulan serta mencari alternatif pemecahan masalah.

1.8 Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat membuat sebuah perancangan yang tepat, diperlukan adanya data-data mengenai seluruh bagian yang terkait. Oleh karena itu pengumpulan data dalam penulisan ini diperoleh dengan cara :

a. Observasi (Pengamatan)

Merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan.

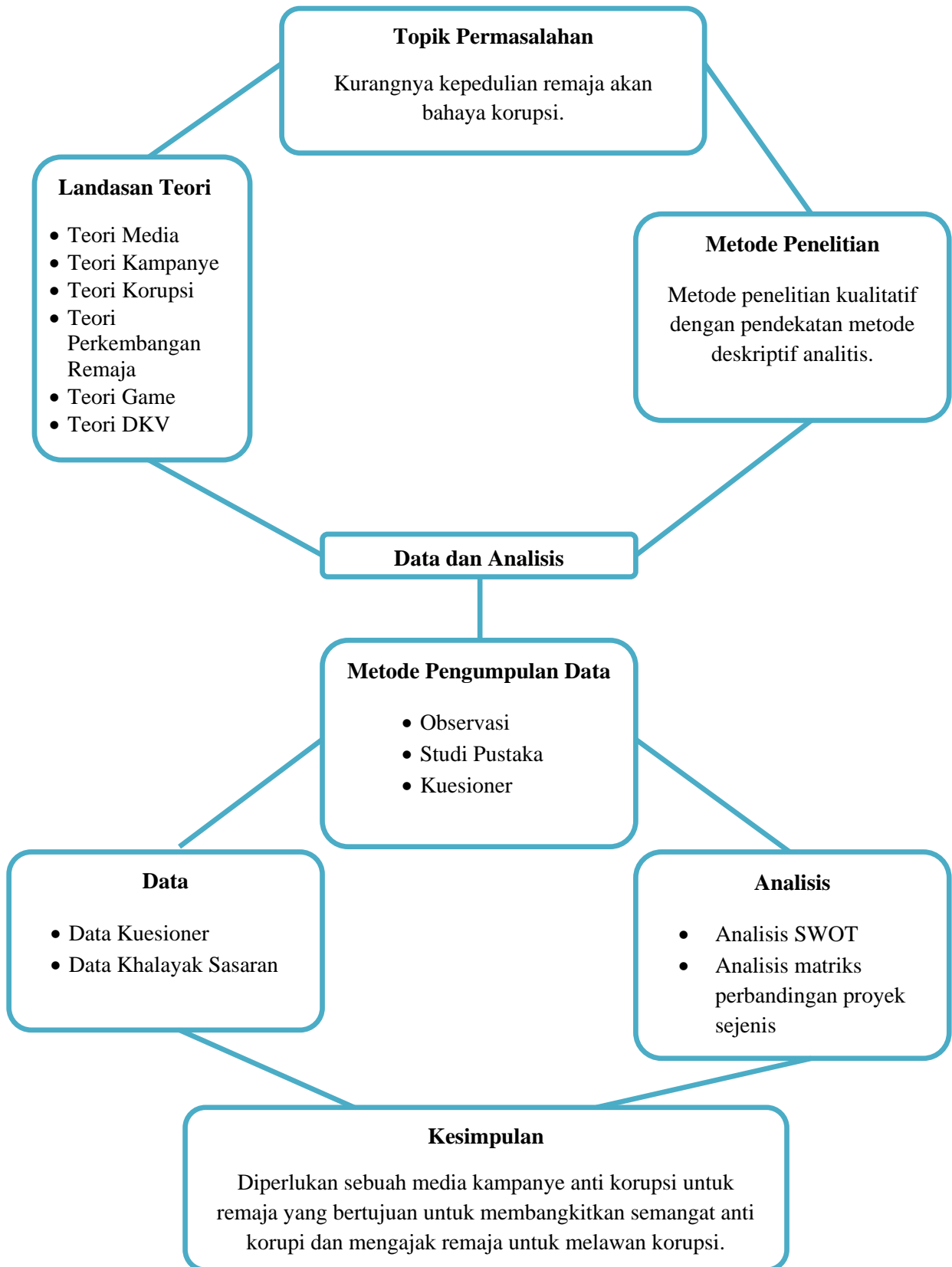
b. Kajian Pustaka

Merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mempelajari, membaca dan menganalisa buku-buku serta teori yang relevan dengan masalah yang dihadapi.

c. Kuesioner

Merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara menyebarkan form isian kepada target audience yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan korupsi.

1.9 Kerangka Perancangan



Skema 1.1 Kerangka Perancangan

1.10 Pembabakan

Penulisan ini tersusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab Pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan perancangan, manfaat perancangan, metode pengumpulan data, kerangka perancangan, dan sistematika penulisan.

BAB II Dasar Pemikiran

Menjelaskan dasar pemikiran dari teori-teori yang relevan untuk digunakan sebagai dasar perancangan Tugas Akhir.

BAB III Data dan Analisis

Pada bab ini diuraikan data tentang permasalahan yang dibahas serta hasil penelitian dan analisis masalah.

BAB IV Konsep dan Hasil Perancangan

Berisi konsep perancangan dan hasil perancangan, mulai dari sketsa hingga penerapan visual pada media.

BAB V Penutup

Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.